



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KOMPARATIF PENERAPAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PIUTANG (STUDI PADA LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
SELATAN TA 2015)**

**Oleh:**

**HAJARUNNADIFAH  
1410539051**

*Diajukan untuk memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*

**PADANG**

**2016**

**Dosen Pembimbing : Firdaus, SE, M.Si, Ak**

	No. Alumni		No. Alumni
	Universitas	<b>HAJARUNNADIFAH</b>	Fakultas
<b>BIODATA</b>			
<p>a) Tempat, Tanggal Lahir: Demak, 20 Juli 1990; b) Nama Orang Tua: Saryadi dan Afini; c) Fakultas: Ekonomi; d) Jurusan: Akuntansi; e) No. BP: 1410539051; f) Tanggal Lulus: 13 Desember 2016; g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan; h) IPK: 3,40; i) Lama Studi: 2 Tahun; j) Alamat: Jalan Legoso Raya Gg. Bungur RT. 005 RW. 08 No. 40, Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.</p>			
<p><b>Analisis Komparatif Penerapan Kebijakan Akuntansi Piutang (Studi pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA 2015)</b></p> <p>Skripsi oleh: Hajarunnadifah Pembimbing: Firdaus, SE, M.Si, Ak</p> <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penerbitan PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 telah membawa banyak perubahan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Perubahan dituangkan dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang menjadi dasar sebelum diterapkan dalam penyajian laporan keuangan. Perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual harus dilakukan paling lambat pada 2015.</p> <p>Beralihnya basis akuntansi yang dianut, dari basis kas menjadi basis akrual mau tak mau membawa permasalahan, salah satunya pada akun piutang. Basis akuntansi akrual mensyaratkan bahwa piutang disajikan dalam nilai wajar yang dapat direalisasikan, di mana diperlukan penyisihan atau taksiran piutang tak tertagih untuk memperoleh nilai piutang netto. Pada pemerintah daerah, permasalahan dalam penyajian piutang terletak pada pelimpahan Piutang PBB-P2 dari pusat ke daerah, di mana data penunggak Piutang PBB-P2 sering kali tidak valid sehingga nilai piutang diragukan .</p> <p>Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan kebijakan akuntansi piutang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada Laporan Keuangan TA 2015.</p>			

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum adopsi SAP pada kebijakan akuntansi di kedua daerah telah dilaksanakan dengan baik. Penerapan kebijakan akuntansi di laporan keuangan pada Kabupaten Pasaman Barat lebih baik dan informatif dalam mengungkapkan piutang baik perubahan saldo, maupun dalam permasalahan piutang PBB-P2 dibandingkan di Kabupaten Solok Selatan.

**Kata Kunci:** SAP, Piutang, Kebijakan Akuntansi



***Comparative Analysis of The Application of Account Receivables Policies  
(Studies on Kabupaten Pasaman Barat and Kabupaten Solok Selatan  
Financial Reports For the Year Ended 2015)***

*by: Hajarunnadifah*

*Supervised by: Firdaus, SE, M.Si, Ak*

***ABSTRACT***

*The publication of PP 71/2010 and Permendagri 64/2013 has brought a lot of changes in government financial reporting system. These changes outlined in accounting policies and system which has to be the principle before being applied in providing the financial statements. The accounting basis that change towards accrual basis must be made no later than in 2015.*

*The basis change, which happened from cash basis towards accrual basis inevitably brings up several problems, including account receivable as one of them. Accrual basis requires that the receivables are presented in a realizable fair values, which it be requiring allowance or estimation for doubtful accounts in order to obtain the net receivable value. As for the local government, the problems of presenting receivables lies on the delegation of Urban and Rural Land & Building Tax (PBB-P2) from the central to the local government, where the data of delinquent taxpayers are often to be invalid implicating doubtful amount of receivable value.*

*The purpose of this study is to see the application of account receivables accounting policies that has been done in West Pasaman and South Solok District in their Financial Statement for the year ended 2015.*

*The results showed that the adoption of Government Accounting Standard (SAP) within the accounting policies for both areas has been implemented properly. The implementation of the accounting policies in Financial Statement on West Pasaman District is better and more informative in explaining account receivable, both in balance changes and PBB-P2 receivable issues more than South Solok District.*

***Keywords:*** *SAP, Accounts Receivable, Accounting Policy*